

## **PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI INDONESIA**

**Jumadi**

**Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura**

surel: jumadi@fisip.untan.ac.id

### **Abstrak**

Globalisasi merupakan konsep yang paling berpengaruh dalam pergumulan bangsa di era modern sekarang ini. Hampir semua sisi kehidupan masyarakat kita terkena dampak dari globalisasi tersebut. Globalisasi bukan saja sekedar hubungan saling ketergantungan ekonomi, melainkan juga tentang transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia. Dalam konteks politik di negara-negara berkembang, globalisasi telah mentransformasi menjadi kekuasaan politik negara modern. Globalisasi membuat berkurangnya peran Negara dalam aktivitas ekonomi dan diganti oleh kekuatan pasar, munculnya struktur dan aktor-aktor baru dalam kehidupan ekonomi dan politik. Namun seiring dengan dengan perkembangan globalisasi tersebut, situasi dunia juga diikuti oleh ketidakpastian, semakin meluasnya ketidakmerataan distribusi pendapatan di antara Negara bangsa. Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang jantung persoalan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan dampaknya terhadap Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global. Globalisasi juga diyakini sebagai pendorong gelombang demokrasi di berbagai belahan dunia, meskipun di sisi lain ada kecenderungan bahwa imbas ekonomi politik dari globalisasi justru mengancam masa depan demokrasi itu sendiri. Terkait dengan peran negara dan kondisi sosial ekonomi Indonesia ditengah liberalisasi ekonomi, salah satu masalah yang kita hadapi saat ini adalah masih tingginya ketimpangan sosial-ekonomi. Fakta lain menunjukkan bahwa globalisasi sudah tidak lagi berbicara pada level antar negara yang tidak memiliki sekat sama sekali (*state borderless*) namun sudah bergerak ke level yang lebih kecil yakni suatu wilayah, seperti provinsi, kabupaten atau kota di sebuah negara.

**Kata kunci: globalisasi, ekonomi daerah, ketimpangan**

### **Abstract**

*Globalization is the most influential concept in the nation's struggle in today's modern era. Almost all sides of our society are affected by globalization. Globalization is not just a relationship of economic interdependence, but also about the transformation of time and space in human life. In the political context in developing countries, globalization has transformed into the political power of the modern state. Globalization reduces the role of the State in economic activity and is replaced by market forces, the emergence of new structures and actors in economic and political life. But along with the development of globalization, the world situation is also followed by uncertainty, the increasingly widespread inequality of income distribution among nation-states. This paper tries to explain the heart of the problems of globalization and economic liberalization and their impact on Indonesia as part of a global society. Globalization is also believed to be the driver of a wave of democracy in various parts of the world, although on the other hand there is a tendency that the political-economic impact of globalization threatens the future of democracy itself. Related to the role of the state and Indonesia's socioeconomic conditions amid economic liberalization, one of the problems we face today is the high socio-economic inequality. Other facts show that globalization no longer speaks at the level of inter-state that has no boundaries at all (state borderless) but has moved to a smaller level, namely a region, such as a province, district or city in a country.*

**Keywords:** *globalization, local economy, the disparity*

### **PENDAHULUAN**

Globalisasi sebagai sebuah determinasi sejarah yang tidak bisa dihindari bagi setiap bangsa atau Negara, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, setiap kita harus mengikuti arus globalisasi tersebut dengan segala daya dan kemampuannya. Bagi Negara yang siap dengan sumberdaya ekonomi, manusia, dan teknologi, tentu memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi kompetisi yang begitu tajam. Globalisasi yang diiringi dengan

persaingan yang begitu ketat antar negara, memaksa Negara-negara miskin dan Negara-negara sedang berkembang untuk bersaing dengan Negara-negara maju. Dengan berbagai kekurangan dan kelemahan serta carut-marutnya kehidupan sosial, ekonomi dan politik, Negara-negara miskin dan Negara-negara berkembang harus menghadapi kompetisi global tersebut.

Globalisasi yang ditandai dengan semakin berkurangnya peran Negara dalam aktivitas ekonomi dan diganti oleh kekuatan pasar membawa dampak yang signifikan bagi munculnya

struktur dan aktor-aktor baru dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional telah menjadi kekuatan tersendiri dalam hubungan ekonomi-politik internasional. Proses globalisasi juga telah mengintegrasikan Negara-negara bangsa menuju kearah *state borderless*. Globalisasi juga menimbulkan implikasi yang sangat kompleks, yaitu munculnya saling ketergantungan (*interdependence*) dalam hampir seluruh dimensi kehidupan dalam hubungan antarnegara-bangsa (*nation state*) dan hubungan trans-nasional (*transnational relations*).

Namun seiring dengan dengan perkembangan globalisasi dalam pandangan yang bersifat neoliberal tersebut, situasi dunia juga diikuti oleh ketidakpastian, semakin meluasnya ketidakmerataan distribusi pendapatan di antara Negara bangsa, tingkat pengangguran yang semakin meluas, degradasi lingkungan, dan akibat merusak globalisasi, yakni kehancuran ekonomi banyak Negara akibat tidak adanya regulasi aliran modal global dan kecenderungan Negara-negara maju bernafsu memperkuat hegemoni politik dan ekonominya di Negara-negara miskin dan Negara-negara sedang berkembang. Paradoks dari proses globalisasi inilah yang kemudian memunculkan pandangan bahwa globalisasi telah memunculkan suatu bentuk imperialisme baru. Ada negara-negara yang mampu mengambil keuntungan dari proses globalisasi ekonomi tersebut, tapi juga tidak sedikit Negara-negara menjadi

terpinggirkan, menggerus struktur ekonomi nasional dan diikuti oleh semakin melebarnya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi. Sebagai bagian dari bangsa di dunia Indonesia tentu mendapat dampak dari liberalisasi ekonomi, dampak tersebut bisa positif ataupun negatif. Globalisasi ekonomi yang menghadirkan liberalisasi ekonomi tersebut bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk arah kebijakan politik ekonomi Indonesia.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **Jantung Persoalan Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi**

Kendati globalisasi memiliki wajah yang multidimensional, namun globalisasi ekonomi senantiasa wujud paling dominan dalam perkembangan dunia saat ini. Kondisi ini terjadi karena globalisasi ekonomi memiliki dampak nyata dan paling signifikan terhadap mekanisme tata kelola (*governance*) pada level Negara dibandingkan dengan bentuk globalisasi non ekonomi. Struktur dan aktor globalisasi ekonomi tentu tidak lepas dari eksistensi dan peran lembaga-lembaga keuangan Internasional seperti Bank Dunia, IMF dan WTO serta lembaga-lembaga kerjasama ekonomi dan perdagangan yang melingkupi sebagian kawasan di dunia. Lembaga-lembaga keuangan Internasional dan institusi perdagangan yang bersifat multilateral dan regional dalam realitasnya bekerja hanya kepentingan Negara anggota dan

kawasannya saja. Negara-negara maju dalam realitasnya juga punya kecenderungan untuk berkuasa menggunakan pengaruhnya demi kepentingan ekonomi dan politiknya.

Tidak hanya globalisasi, terdapat pula kebijakan turunan guna mendukung penuh bekerjanya liberalisasi ekonomi diantaranya privatisasi dan deregulasi, semuanya tidak dapat bekerja secara parsial. Dengan kondisi demikian, fenomena tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah peluang bahkan sekaligus ganjaran bagi siapapun yang tidak efisien dalam memproduksi sumber daya ekonomi. Meskipun dalam motif perlindungan atas perekonomian dalam negeri sekalipun, suatu negara tidak diperbolehkan lagi membuat kebijakan protektif sebab kesepakatan internasional tidak menghendaki praktik tersebut. Tidak berlebihan ketika liberalisasi ekonomi diibaratkan dua sisi mata uang yang dapat memberikan efek yang saling berseberangan.

Beberapa negara, salah satunya China (sekarang Tiongkok) merupakan suatu bukti nyata kemajuan negara yang mengambil keuntungan pada peleburannya terhadap pergaulan ekonomi dunia. Keberhasilan perkembangan ekonomi China hendaklah dilihat sebagai keberhasilan negara tersebut menciptakan visi yang jelas. Hal tersebut termasuk implikasinya terhadap eksisnya “*blue print*” ekonomi-politik yang jelas, tidak terombang-ambing, dan melihat “faktor global” tidak menjadi ancaman

bagi kondisi ekonomi dan politik domestic China.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global juga telah meratifikasi serangkaian persetujuan perdagangan bebas. Keikutsertaan Indonesia dalam liberalisasi ekonomi tersebut mengandung beragam interpretasi. *Pertama*, dapat diartikan bahwa pemerintah menganggap kondisi dalam negeri telah memiliki fondasi kuat untuk selanjutnya bersaing pada tataran global. *Kedua*, adanya tekanan pada aras global, regional maupun bilateral yang mendesak Indonesia untuk meratifikasi aneka kerjasama pada tiap levelnya. *Ketiga*, pengaruh internal akibat kelambanan pemerintah untuk menyegerakan kesejahteraan bagi warga negaranya sekaligus *self-development* sehingga mencoba untuk menuai perbaikan lewat liberalisasi ekonomi (Yustika, 2014).

Pada akhir 2015 yang lalu, dikawasan ASEAN telah diberlakukannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean atau *Asean Economic Community* (AEC) yang diperkirakan membuka pasar bagi lebih dari 600 juta orang dikawasan ASEAN, di mana 43% di antaranya ada di Indonesia. Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Indonesia selain memiliki peluang besar menjadi Negara maju, tapi juga banyak tantangan yang dihadapi untuk bisa kompetitif dalam Masyarakat Ekonomi Asean tersebut.

*ASEAN Economic Community* atau MEA secara garis besar terfokus dalam empat hal, yaitu: (1) Terciptanya pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dengan menghilangkan batasan terhadap arus barang, investasi, modal, jasa, dan tenaga profesional antarnegara di Asia Tenggara, (2) Membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan, perlindungan konsumen, dan berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan kondisi ekonomi yang adil, (3) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata, dan (4) Meningkatkan kemampuan berintegrasi dengan perekonomian global. Untuk mewujudkan empat pilar utama MEA tersebut tentu diperlukan komitmen bersama dan peningkatan kapasitas dalam berbagai sektor di masing-masing Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN

Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN jika didukung dengan produktivitas yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang potensial. Tantangan yang kita hadapi dengan arus perdagangan bebas entah itu barang maupun jasa akan memunculkan *competition risk*. Artinya, selain menjadi negara pengekspor, Indonesia juga menjadi sasaran empuk eksportir dari negara

lain. Hal ini mengakibatkan munculnya produk-produk luar yang beragam dalam jumlah banyak ke Indonesia.

Berdasarkan laporan Harian Kompas yang kemudian dibukukan menjadi *Menatap Indonesia 2015 Antara Harapan dan Tantangan*, dijelaskan bahwa secara umum kendala yang dihadapi Indonesia untuk bisa berkompetisi dalam perdagangan bebas dikawasan ASEAN adalah terkait dengan masih lemahnya infrastruktur, kualitas SDM yang masih lemah, kualitas angkatan kerja yang masih rendah, dan masih adanya ketimpangan wilayah. Khusus di wilayah regional Kalimantan, kendala yang dihadapi adalah, kualitas SDM yang masih rendah, pembangunan infrastruktur jalan masih terbatas, dan akses antar wilayah terbatas serta masih banyak yang terisolir. Dengan berbagai tantangan dan kendala yang ada tentu suka tidak suka kita harus ikut menjalani globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dikawasan ASEAN tersebut.

### **Globalisasi dan Dampaknya Terhadap Demokrasi**

Hampir semua sisi kehidupan masyarakat terkena dampak dari pengaruh globalisasi tersebut, perilaku sosial, kesejahteraan, dinamika politik, dan lain-lain. Perdebatan yang muncul berkaitan hubungan globalisasi dan demokrasi bermuara pada dua persoalan yang bertolak belakang. Pendapat pertama mengatakan bahwa globalisasi mengancam demokrasi. Sebaliknya pendapat kedua

menyatakan bahwa globalisasi mengembangkan demokrasi. Dalam konteks itu kita dapat mengukur globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi tergantung pada apakah globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesetaraan yang lebih luas diantara individu-individu dan masyarakat tatanan kehidupan bernegara.

Dalam konteks politik dinegara-negara berkembang, globalisasi telah mentransformasi kekuasaan politik negara modern dan warga negara. Terdapat beberapa ilmuwan menyatakan bahwa globalisasi pasar bebas akan mendorong demokratisasi politik seperti (Anthony Giddens, David Held, Francis Fukuyama). Dalam sejarah, sistem demokrasi mencatat kemenangan historis atas sistem lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Globalisasi dan kesejahteraan negara merupakan faktor yang memberi warna dalam mendorong demokratisasi dewasa ini.

Menurut Giddens (2000), globalisasi bukan saja sekedar hubungan saling ketergantungan ekonomi, melainkan tentang transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dicontohkan bahwa peristiwa-peristiwa di tempat jauh, baik yang berhubungan dengan ekonomi maupun tidak, mempengaruhi manusia secara langsung secara lebih cepat dari pada yang pernah terjadi sebelumnya, sebaliknya juga keputusan-keputusan yang diambil oleh individu-individu seringkali memiliki implikasi global.

Globalisasi juga menekan pada dasarnya menciptakan tuntutan dan kesempatan-kesempatan untuk menggenerasikan identitas lokal. Globalisasi dipahami bahwa hal tersebut sebuah rentangan proses yang kompleks dalam negara yang digerakkan oleh berbagai pengaruh, terutama pengaruh politik dan ekonomi.

Sejalan dengan Giddens, Held (1995) menjelaskan bahwa globalisasi tercermin pada dua fenomena yang memiliki pengaruh nyata dalam kehidupan bernegara. Pertama, melonggarnya rantai-rantai yang membelenggu aktivitas politik ekonomi, dan sosial sehingga semua aktivitas tersebut kini membentang seluas dunia. Kedua, semakin intensnya tingkat interaksi dan ketersaling hubungan di dalam dan di antara Negara-negara serta masyarakat.

Globalisasi diyakini sebagai pendorong gelombang demokrasi di berbagai belahan dunia, meskipun di sisi lain ada kecenderungan bahwa imbas ekonomi politik dari globalisasi justru mengancam masa depan demokrasi. Terjadi dinamika dalam struktur ekonomi-politik global Negara-negara berkembang tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi ini berdampak pada negara-negara bahwa, negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam ekonomi-politik internasional. Perannya telah digantikan oleh aktor-aktor baru yang bernaung di bawah bendera lembaga-lembaga Internasional, perusahaan-perusahaan

multinasional, maupun negara-negara yang menganut paham sistem keterbukaan.

Bahkan di era globalisasi sekarang ini membicarakan mengenai Negara bangsa seakan kurang relevan karena perannya digantikan oleh lembaga-lembaga internasional dan Negara kawasan. Demokrasi konvensional seperti adanya lembaga perwakilan politik, PEMILU, dan partisipasi warga negaranya hanya ditujukan dalam kerangka Negara territorial yang berdaulat. Namun ketika struktur ekonomi politik internasional mengalami perubahan institusi politik dan PEMILU di satu negara sangat dipengaruhi kekuatan eksternal, dan bahkan dalam kasus-kasus tertentu lembaga-lembaga seperti WTO, IMF dan Bank Dunia dan mempunyai kekuatan pemaksa yang sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan politik Negara-negara sedang berkembang dan terutama yang mengalami krisis ekonomi dan politik.

Pada akhirnya, semua gerak perubahan tersebut mempunyai implikasi terhadap kapasitas Negara dalam melakukan regulasi. Negara-negara bangsa tidak lagi otonom dalam melakukan pengambilan keputusan dengan harus memperhatikan aktor-aktor lain diluar dirinya, baik dalam konteks regional. Dalam konteks itulah menurut Held (1995) globalisasi telah membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern. Meskipun pandangan yang agak skeptis mengatakan bahwa globalisasi sedikit banyak telah mengurangi kedaulatan Negara nasional

sebagaimana diyakini kaum hiperglobalis. , namun yang jadi persoalan adalah globalisasi telah mengartikulasikan kewajiban dan kekuasaan Negara bangsa dalam suatu cara yang kompleks, yang melibatkan perkembangan ke arah menyebarnya kekuasaan dunia dan diiringi oleh menyebarnya otoritas dan bentuk-bentuk pengaturan yang semakin kompleks (Winarno, 2012).

Fukuyama (2003) mengatakan bahwa akhir dari peradaban adalah kapitalisme. Persaingan kini bukanlah kapitalis dengan sosialis, namun kapitalis dengan kapitalis, dan kapitalisme akan menjadi ideologi peradaban abad 21 dan bahkan ke depan. Demokrasi sekarang ini memang telah bergerak kesatu arah, yaitu demokrasi liberal, karena hanya demokrasi dalam pola masyarakat kapitalis ini yang paling sesuai untuk liberalisasi perdagangan dunia, karena hanya demokrasi ini yang paling cocok dengan tatanan Negara sekarang ini. Tentu saja, gerakan menuju ke arah demokrasi seperti ini mesti ditopang oleh berbagai pendekatan mutakhir, salah satunya adalah *good governance* yang dijadikan sebagai *software* dari demokrasi modern.

Administrasi Publik Indonesia melalui (LAN) Lembaga Administrasi Publik megindonesiakan *good governance* sebagai pemerintahan yang baik dan mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruksi yang

konstruktif di antara domain-domain Negara, sector swasta, dan masyarakat. Konsep tersebut dapat tercepat ketika terdapat adanya proses-proses liberalisasi antara beberapa stakeholder dan hal ini merupakan bagian dari efek globalisasi. Dalam perkembangan saat ini *good governance* sudah berkembang menjadi *dynamic governance*, di mana diperlukan kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan yang cepat. Peran pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan dan menyediakan pelayanan public yang cepat menjadi penting dalam dunia yang selalu berubah-ubah, penuh dengan berbagai tantangan untuk menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi mutakhir yang tiada henti.

Perubahan merupakan esensi dasar dalam *dynamic governance*, karena untuk dapat menyesuaikan cara yang ditempuh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan dinamika perubahan lingkungan diperlukan berbagai perubahan baik aspek perencanaan maupun implementasinya. Perencanaan dan implementasi harus adaptif dengan besar kecilnya ketidakmenentuan masa depan lingkungan global. Perubahan itu sendiri umumnya merupakan hasil perpaduan dari dua unsur, yaitu: budaya dan kemampuan (organisasi pemerintah).

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kajian pustaka melalui sumber-sumber referensi yang beragam mulai dari buku, artikel jurnal, dokumen perundang-undangan, dan artikel internet yang terpercaya. Penulis melakukan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data.

## **PEMBAHASAN**

### **Ekonomi Global Terhadap Politik Indonesia dan Peran Negara**

Politik merupakan salah satu bidang kehidupan yang tidak terlepas dari pengaruh pesatnya globalisasi. Dampak positif globalisasi di bidang politik sangat bermanfaat dalam menjalankan politik negara, namun dampak negatifnya dapat mengancam keberlangsungan sebuah negara. Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya globalisasi dalam kehidupan politik di Indonesia? dampak positif yang bermanfaat globalisasi dalam bidang politik sering dikaitkan dengan kebebasan media massa dan politik. Hal ini tentu memberi dampak positif bagi terbentuknya sistem politik di sebuah negara. Hadirnya globalisasi di bidang politik juga memicu terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis, di mana rakyat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan politik pemerintahan.

Namun demikian, hadirnya sistem demokrasi yang memberi kebebasan ini ternyata bisa

menimbulkan dampak yang buruk. Kebebasan berpendapat yang disalahgunakan bisa memicu kegaduhan politik dan masuknya berbagai ideologi asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ketidakharmonisan sosial, politik dan hadirnya ideologi asing tersebut berpotensi menciptakan disintegrasi dan menghilangkan rasa nasionalisme. Kebebasan politik yang berlebihan tidak didasarkan pada budaya politik Indonesia tentu akan berdampak negative dan destruktif bagi keutuhan NKRI. Atas nama demokrasi, patronase politik antara elit dan massa politiknya tidak semata hubungan yang bersifat patron-klien, tapi sudah semakin fragmatis. Implikasinya, persingan politik dalam Pemilu dan Pilkada untuk mendapatkan dukungan uang menjadi salah satu faktor determinan. Cost politik yang begitu mahal dalam Pemilu dan Pilkada disinyalir menjadi salah satu sebab mengapa semakin banyaknya politisi dan kepala daerah yang terlibat dalam tindakan korupsi.

Walaupun dalam banyak kasus globalisasi ditandai dengan semakin berkurangnya peran Negara dalam aktivitas ekonomi dan diganti oleh kekuatan pasar, menurut Bob Jessop (dalam Aziz SR editor, 2019) bahwa ekonomi bukanlah suatu variable yang terlepas dari variable Negara. Tidak semua persoalan ekonomi dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan pasar dapat diatasi melalui mekanisme pasar semata, melainkan butuh pula mekanisme nonpasar. Dalam kaitannya dengan itulah Jessop mengajukan

empat alasan mengapa masih perlunya peran Negara melakukan intervensi dalam ekonomi. Kehadiran Negara dalam ekonomi menurut Jessop bukan berarti Negara terlalu jauh mengatur kehidupan pasar, melainkan untuk memastikan dan menjamin mekanisme pasar dan kehidupan ekonomi dapat berjalan secara sehat.

Sementara itu menurut Pieron (dalam Aziz SR editor, 2019), belahan besar negara dalam hubungannya dengan ekonomi, yakni Negara sebagai pelaku ekonomi (*economic actor*) dan Negara sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*). Sebagai pelaku ekonomi, Negara memainkan empat peranan penting yakni *pertama*, Negara sebagai pemilik; *kedua*, Negara sebagai pemilik-produsen; *ketiga*, Negara sebagai majikan; dan *keempat*, Negara sebagai redistributor. Sedangkan sebagai pembuat kebijakan, Negara memainkan dua peran utama, yakni Negara sebagai regulator dan Negara sebagai pembuat kebijakan atau pengambil keputusan.

Terkait dengan peran Negara dan kondisi sosial ekonomi Indonesia ditengah liberalisasi ekonomi, salah satu masalah yang kita hadapi adalah masih tingginya ketimpangan sosial-ekonomi yang ditandai oleh jurang yang lebar antara kelompok kaya-miskin, kepemilikan asset, dan penguasaan lahan yang tidak seimbang. Menurut data BPS, pada awal Maret 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyana menyatakan bahwa Gini Rasio harus diwaspadai karena menyangkut ketimpangan sosial di masyarakat. Pada Maret 2019, tingkat

ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,382. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,007 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,317, turun dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,319 dan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi namun tidak diikuti dengan pemerataan tetap saja membuat kesenjangan tetap melebar. Oxfam dan INFID juga mencatat bahwa kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Sebuah lembaga keuangan Swiss, *Credit Suisse* pernah merilis hasil surveinya bahwa Indonesia masuk sebagai salah satu kategori Negara yang tingkat ketimpangan orang kaya dan miskinnya masih sangat tinggi, di mana 1% orang terkaya Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional.

Dalam konteks kewaspadaan nasional bisa kita identifikasi bentuk ancaman keamanan Negara dalam bentuk *Proxy War* memperlihatkan bahwa penguasaan asing terhadap pengelolaan sumber daya alam cukup besar. Di sektor migas dan batu bara

antara 70-75 persen, telekomunikasi antara 70 persen. Dampak dari penguasaan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sangat berisiko pada dominasi pihak asing menyangkut keputusan strategis dan ketidakstabilan politik dan keamanan. Dampaknya lainnya adalah sangat berpeluang intervensi asing terhadap berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam konstitusi UUD 1945 cukup tegas meletakkan prinsip-prinsip ekonomi yang harus menjadi acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi nasional. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Dalam kenyataan, Pasal 33 UUD 1945 tidak terlihat diletakkan sebagai paradigma dalam membangun sistem ekonomi nasional. Ia tidak sedang menjadi roh perekonomian nasional. Jejak-jejak pasal 33 UUD 1945 dalam kebijakan-kebijakan ekonomi selama ini sangat sulit ditemukan. Indikator yang dapat dikemukakan untuk mendukung terkait masih belumnya pasal 33 tersebut menjadi roh perekonomian nasional adalah ketiadaan UU tentang sistem ekonomi sebagai derivasi Pasal 33 UUD 1945. Hal ini penting karena berkaitan dengan empat hal yakni *pertama*, kepentingan mendasar seluruh rakyat Indonesia; *kedua*, demi keadilan sosial-ekonomi; *ketiga*, demi hajat hidup orang banyak; dan *keempat*, sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, globalisasi dengan ekonomi pasar yang sudah menjadi bagian dari kebijakan perekonomian kita tidak serta merta harus meninggalkan peran negara. Cara kita mengelola sumber daya dalam perspektif pasal 33 UUD 1945 adalah sebuah bentuk kehadiran Negara dalam perekonomian. Kegagalan pemerintah dalam mengejawantahkan pasal 33 dan tidak mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi dari sumber daya yang dimiliki adalah sesat kebijakan. Menghadapi dinamika perubahan zaman yang terus terjadi, roh, dan tulang punggung perekonomian Indonesia tak boleh lepas dari visi besar tentang kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Apa lagi, jangan

sampai visi besar tersebut tersandera oleh kepentingan asing.

### **Kondisi Kalimantan Barat di Era Ekonomi Global**

Kohesifitas antara otonomi daerah dan globalisasi merupakan suatu keniscayaan bagi proses dan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah, tak terkecuali Kalimantan Barat. Artinya, globalisasi sudah tidak lagi berbicara pada level antar negara yang tidak memiliki sekat sama sekali (*state borderless*) namun sudah bergerak ke level yang lebih kecil yakni suatu wilayah, seperti provinsi, kabupaten atau kota di sebuah negara. Hal ini memunculkan persoalan serius yang bisa menjadi ganjalan bagi desentralisasi dan otonomi daerah karena ia berlangsung dalam sebuah era globalisasi yang serba cepat, terbuka dan luas.

Dalam situasi semacam itu, otonomi yang dimiliki oleh daerah akan sangat menentukan pemerintahan daerah dalam mendorong pembangunan. Daerah-daerah yang mampu bekerja secara efisien akan mampu memaksimalkan setiap peluang yang ditawarkan oleh globalisasi sehingga mampu mendorong pembangunan daerah yang memberikan kesejahteraan bagi warganya. Sebaliknya, pemerintahan daerah yang tidak efisien akan ditelan oleh globalisasi melalui perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah-wilayah tersebut. Akibatnya, kekalahan di tingkat nasional akan

ditransformasikan dengan cepat ke daerah. Oleh karena itu setiap daerah harus memanfaatkan otonomi daerah sebagai jalan untuk meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi masing-masing."Otonomi daerah harus dapat menumbuhkan inovasi dan praktik yang baik. Ukuran-ukuran daya saing daerah di era globalisasi ekonomi saat ini lebih mengacu pada paratmeter yang dibuat oleh lembaga-lembaga regional dan internasional.

Daerah Kalimantan Barat yang memiliki posisi strategis karena memiliki perbatasan darat dan laut dengan wilayah Malaysia. Dengan demikian, di era globalisasi ekonomi saat ini tentu memiliki nilai tawar tersendiri sesuai dengan kondisi, karakterter dan potensi ekonomi yang dimilikinya. Dari 17 (tujuh belas) sektor perekonomian penyusun PDRB di Kalimantan Barat, terdapat 4 (empat) sektor dengan kontribusi terbesar, yakni Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 21,08 persen; sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 16,18 persen, sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 14,49 persen; dan sektor Konstruksi dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 12,40 persen.

Realisasi investasi PMDN, pada tahun 2017 sebesar 20,68 persen. Sedangkan realisasi investasi PMA tahun 2017 baru mencapai 36,38 persen. Persoalan ketersediaan

infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modal. Seperti sektor primer dengan bidang usaha perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling diminati karena infrastruktur relatif tersedia. Sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik dan pelabuhan) yang memadai. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat rata-rata tumbuh 5,3 persen tiap tahunnya.

Pada triwulan kedua tahun 2019, ekonomi Kalbar tumbuh 5,08 persen. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) pada tahun 2018 sebesar 0,328. Angka rata-rata lama sekolah hanya selama 7,48 tahun. Sesuai dengan target RPJMD Provinsi Kalbar, pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2020 ditargetkan tumbuh sebesar 5,35 persen, dan angka indeks pembangunan manusia sebesar 67,87 persen. Posisi IPM Kalbar saat ini berada di urutan ke 29 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Angka tingkat kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 7,37, termasuk yang tertinggi di regional Kalimantan. Pada tahun 2020 angka kemiskinan ditargetkan paling tinggi mencapai 6.43.

Saat ini globalisasi, desentralisasi dan daya saing daerah merupakan bagian dari isu utama yang memengaruhi tatanan sistem ekonomi dan perdagangan, baik dalam kegiatan produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Era globalisasi menuntut setiap pelaku ekonomi untuk

meningkatkan kemampuan bersaing, baik dalam memproduksi, memasarkan, maupun menerobos pasar yang batas-batasnya semakin tidak jelas, serta dalam suatu kerangka persaingan yang sangat kompetitif. Disinilah letak peran penting dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, kapasitas sumber daya aparatur, memperbaiki pelayanan public dan memperbaiki berbagai infrastruktur yang mampu menopang perkembangan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil analisis daya saing provinsi-provinsi di Indonesia hasil survei pada tahun 2019 yang dilakukan oleh *Asia Competitiveness Institute (ACI) Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore*, Daya saing Kalimantan Barat berada pada peringkat ke 23, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2018 yang berada pada peringkat 28 dari 34 provinsi. Stabilitas Ekonomi Makro Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2019, Kalbar berada pada peringkat 18, mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2018 yang berada pada peringkat ke 26. Sedangkan kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2019, Kalbar berada pada peringkat ke 31, yang pada tahun 2018 berada pada peringkat ke 33 dari 34 provinsi.

Berangkat dari kondisi objektif yang ada di daerah khususnya di Kalimantan Barat, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di era ekonomi global cukup berat. Keterbatasan SDM dan infrastruktur

serta masih adanya distorsi antara pusat dan daerah dalam berbagai regulasi dan kebijakan cukup mempengaruhi kapasitas daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Memang daerah saat ini memiliki kebebasan dalam mengaplikasikan berbagai aspirasi politiknya sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, namun pusat selalu mendominasi berbagai sumber daya, baik ekonomi, keuangan, hukum, maupun politik. Kendala desentralisasi salah satu faktor utamanya adalah masalah keadilan pusat terhadap daerah.

## KESIMPULAN

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana Negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa ada batas teritorial negara. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu Negara menjadi kabur dan keterkaitan ekonomi nasional dengan perekonomian regional dan internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Dewasa ini, globalisasi mengalami percepatan yang mengharuskan setiap negara menyiapkan perangkat-perangkat strategis guna memenangkan “medan

pertarungan global”. Hubungan ekonomi-politik global umumnya dan keterkaitan ekonomi-politik antara Indonesia dan dunia khususnya, akan banyak berpengaruh pada kesiapan Indonesia menghadapi tantangan globalisasi tersebut. Saat ini telah terjadi dinamika dalam struktur ekonomi-politik global Negara-negara berkembang tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi ini berdampak pada negara-negara bahwa, negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam ekonomi-politik internasional. Perannya telah digantikan oleh aktor-aktor baru yang bernaung di bawah bendera lembaga-lembaga Internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, maupun negara-negara yang menganut paham sistem keterbukaan.

Walaupun dalam banyak kasus globalisasi ditandai dengan semakin berkurangnya peran Negara dalam aktivitas ekonomi dan diganti oleh kekuatan pasar, bukanlah suatu variable yang terlepas dari variable Negara. Kehadiran Negara dalam ekonomi menjadi penting untuk memastikan dan menjamin mekanisme pasar dan kehidupan ekonomi dapat berjalan secara sehat dan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

Globalisasi sudah tidak lagi berbicara pada level antar negara yang tidak memiliki sekat sama sekali (*state borderless*), namun sudah bergerak ke level yang lebih kecil yakni suatu wilayah, seperti provinsi, kabupaten atau kota di sebuah negara. Hal ini memunculkan persoalan serius yang bisa menjadi ganjalan bagi

desentralisasi dan otonomi daerah kalau tidak mampu meningkatkan daya saing daerahnya, karena ia berlangsung dalam sebuah era globalisasi yang serba cepat, terbuka dan luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Giddens. 2000. *Jalan Ketiga dan Kritik-Kritiknya*. Polity Press
- Aziz, Abdul (editor). 2019. *Politik Indonesia Kini Potret Budaya Politik Hingga Dinamika Pilkada*. Intrans Publishing. Malang
- Cahyono, Imam. 2008. *Menjinakkan Metakuasa Global: Suara Indonesia Untuk Globalisasi yang Lebih Adil*.
- David, Held. 1995. *Democracy and the Global Order*. California: Stanford University Press.
- Fukuyama, Francis. 2003. *The End of History and Last Man*. Yogyakarta. Qalam
- Kristeva, Santoso, Sayyid Nur. 2015. *Kapitalisme Negara dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sorensenm, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar dan CCSS.
- Sosialismanto, Duto. 2001. *Hegemoni Negara Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*. Lapaera Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Tinjauan Kompas Menatap Indonesia 2015 Antara Harapan dan

- Tantangan. Kompas Penerbit Buku.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Wangsajaya, Yehu. 2016. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap *Proxy War*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Waspodo TS, Suhanadji. 2004. Modernisasi dan Globalisasi Studi Pembangunan Dalam Perspektif Global. Penerbit Insan Cendikia.
- Winarno, Budi. 2005. Globalisasi Wujud Imprealisme Baru: Peran Negara Dalam Pembangunan. Tajidu Press. Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2012. Jurnal, Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi, Yogyakarta
- Wrihatnolo, Rendy R dan Riant Nugroho. Jurnal 2011. Demokrasi Bagi Negara-Negara
- Yustika, Ahmad Erani. 2014. Perekonomian Indonesia: Memahami Masalah dan Menetapkan Arah. Selaras. Malang.